

# SKRIPSI

**ANDONO KRISTANTO**

## **PELANGGARAN KETENTUAN RAHASIA BANK YANG DILAKUKAN OLEH MANTAN PEGAWAI BANK**



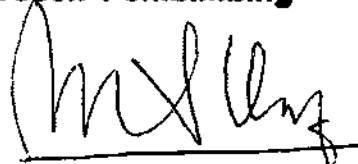
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1998**

**PELANGGARAN KETENTUAN RAHASIA BANK  
YANG DILAKUKAN OLEH MANTAN PEGAWAI BANK**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**



**Hj. Moerdiati, S.H., MS.**  
**NIP. 130287031**

**Penyusun,**



**Andono Kristanto**  
**NIM. 039213610**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1998**

## BAB IV

### PENUTUP

#### Kesimpulan

a. Bahwa penyelesaian suatu pelanggaran terhadap rahasia bank yang dilakukan oleh mantan pegawai bank dapat ditinjau dari tiga sudut pandang yaitu :

1. etika profesi;
2. hukum pidana;
3. hukum perdata.

Yang pertama, yaitu dengan adanya etika profesi membatasi para pelaku profesi untuk bertindak seenaknya dan dalam hal ini pengawasannya dilakukan oleh organisasi profesi.

Yang kedua, yaitu dengan adanya peraturan-peraturan di luar Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan misalnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU No. 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan lain sebagainya, serta pasal 322 ayat 1 KUHP.

Dan yang ketiga, yaitu bahwa suatu pelanggaran yang dilakukan oleh mantan pegawai bank tersebut dapat dikenai ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan melanggar hukum.

b. Suatu pelanggaran ketentuan rahasia bank yang dilakukan oleh mantan pegawai bank dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum bukan sebagai perbuatan wanprestasi, hal ini dikarenakan perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur

sebagai wanprestasi karena telah putusya hubungan kontraktual antara pihak bank dengan pelaku pelanggaran sehingga tidak dimungkinkan lagi adanya pemenuhan terhadap perjanjian tersebut. Dan bahwa pelanggaran tersebut memenuhi seluruh unsur atau kriteria (ada empat kriteria) yang tercantum di dalam pasal 1365 B.W. tentang perbuatan melanggar hukum yaitu : bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

#### Saran

- a. Agar supaya pelaksanaan kode etik profesi lebih ditingkatkan lagi dengan jalan setiap organisasi profesi mempunyai kerjasama dengan organisasi profesi sejenis yang lain dan dengan pihak yang berwenang agar setiap keputusan atau sanksi administratif yang dikenakan terhadap setiap pelanggar dapat dipaksakan, karena dalam hal ini pihak yang paling dirugikan adalah pihak bank yaitu pihak bank akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat yang dapat juga berdampak pada sistem perbankan nasional kita.
- b. Ketentuan mengenai rahasia bank yang diatur di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebaiknya disempurnakan dengan jalan menambahkan ketentuan mengenai "mantan pegawai bank" ke dalamnya sehingga memudahkan penyelesaian suatu masalah yang menyangkut pelanggaran ketentuan rahasia bank yang dilakukan oleh

mantan pegawai bank. Mengenai penerapan ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan melanggar hukum ke dalam permasalahan pelanggaran ketentuan rahasia bank yang dilakukan oleh mantan pegawai bank tersebut di atas, sebaiknya juga dirumuskan ke dalam suatu peraturan yang dapat melengkapi ketentuan-ketentuan yang sudah ada di dalam Undang-undang Perbankan.